



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Tasikmalaya, telah membawa implikasi terhadap perubahan kondisi Kabupaten Tasikmalaya baik dari aspek kewilayahan maupun aspek non ruang seperti data kuantitatif yang ternyata membawa dampak pada berubahnya berbagai indikator makro dalam Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 - 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 - 2005.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2001 - 2005.

Pasal I

Lampiran I, Bab II, angka 2.4. Indikator Makro, diubah dan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Desember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 45 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2002

TANGGAL : 23 DESEMBER 2002

INDIKATOR MAKRO RENSTRA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 - 2005

NO	INDIKATOR MAKRO	2001	2002	2003	2004	2005
1	Indeks Pembangunan Manusia	58,73	60,11	61,52	62,95	64,41
2	Jumlah Penduduk	1.565.906	1.585.937	1.604.822	1.623.348	1.641.498
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,30	1,28	1,19	1,15	1,12
4	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>) & proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	466.360 (29,78 %)	465.240	464.731	463.204	461.677
5	PDRB (berlaku) (<i>Rp. Trilyun</i>)	3,99	4,41	4,87	5,41	6,00
6	Laju Inflasi ; Indeks harga konsumen (%)	16,71	11-12 %	10-11 %	9-10 %	8-9 %
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 1993) (%)	2,95	3,13	3,25	3,75	4,00
8	PDRB per kapita (berlaku) (<i>Rp</i>)	2.679.284	2.921.295	3.188.118	3.496.401	3.835.970
9	Investasi (<i>Rp. Trilyun</i>)	1,67	1,85	2,01	2,23	2,41
10	Laju Investasi (%)	-	10,50 %	8,53 %	11,00 %	8,04 %
11	Konsumsi Pemerintah (G) (berlaku) (<i>Rp. Milyar</i>)	-	507,79	584,33	648,61	719,95
12	Jumlah Penduduk yang bekerja;	590.177	608.650	628.431	651.997	678.077
13	proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total.	37,69	38,38	39,16	40,16	41,31
14	Jumlah Pengangguran Terbuka	35.578	34.464	33.344	32.094	30.810

Keterangan :

1. Data IPM hasil proyeksi dengan menggerakkan masing-masing komponen IPM; Formasi : $IPM = 1/3 * \{ (AHH-25)/60 + [2/3 * (AMH/100) + 1/3 * (RLS/15)] + [(PPH300.000)/432.700] \} * 100$
AHH (Angka Harapan Hidup), AMH (Angka Melek Hurup), RLS (Rata-rata Lama Sekolah), PPP (Purchasing Power Parity – daya beli)
2. Data jumlah penduduk dan LPP tahun 2001 dari rata-rata pertumbuhan per tahun antar Sensus pada SP-2000; Formulasi : $P_t = P_0 (1+r)^{(t-0)}$ atau $r = \sqrt[t]{P_t / P_0} - 1$
3. Jumlah Penduduk Miskin tahun 2001 merupakan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan BKKBN hasil pengolahan data Pra KS dan KS-1 alasan ekonomi (1KK identik 4 orang);
4. Data PDRB berlaku 2001 dan Proyeksi PDRB 2002-2005; proyeksi dengan pendekatan rata-rata bergerak Pertumbuhan PDRB berlaku
5. Inflasi Indeks Harga Konsumen (HK); Formulasi : $Inf_t = (IHK_{des(t)} / IHK_{des(t-1)} - 1) * 100$
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2001-2005; diperoleh dari elastisitas empiris LPE Kabupaten terhadap LPE induk 0,60; elastisitas pertumbuhan Tasikmalaya-Jawa Barat atas dasar harga konstan 1993 yaitu sebesar 0.7859; Elastisitas pertumbuhan menunjukkan besarnya % perubahan PDRB harga konstan daerah Kab yang diakibatkan oleh % perubahan PDRB kontans Prop
7. Investasi dihitung dengan menggunakan asumsi ICOR (Incremental Capital-Output Ratio); Angka ICOR menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan PDRB setiap satu unit. Perhitungan menggunakan Formulasi : $ICOR_t = (I_{t-1} / PDRB_t - PDRB_{t-1})$ atau Investasi : $I_{t-1} = ICOR_t * (PDRB_t - PDRB_{t-1})$ Angka ICOR nasional diperkirakan terus menurun secara bertahap dari 4,4 menjadi 2,0 : ICO Jabar diperkirakan berada pada kisaran yang tidak jauh berbeda. Asumsi ICOR yang digunakan 4 dan menurun sampai 3.75
8. Laju Investasi menggunakan Investasi (butir 9) setelah disesuaikan dengan harga konstan 1993 ;
9. PDRB per kapita diperoleh dengan pendekatan dari PDRB berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun.
10. Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku diperoleh dari pengeluaran rutin & pembangunan serta dana daerah lainnya;
11. Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan atau yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan ;
12. Jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka Tahun 2001 dari SUSEDA 2001.